



BPBD Strategy in Landslide Disaster Management: A Case Study of Sijunjung Regency

Mhd. Fadhel Adli Iskandar*¹, Zikri Alhadi²

mhdfadheladliiskandar@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategy of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sijunjung Regency in handling landslide disasters. Sijunjung Regency experienced 34 landslide events in 2024, ranking third highest in West Sumatra. This research employs a descriptive qualitative method with the Kooten strategy theory approach, which includes four main dimensions: organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. Data were collected through in-depth interviews with BPBD officials, sub-district heads, village chiefs, and disaster experts, supplemented by documentation and field observations. The results indicate that BPBD of Sijunjung Regency has implemented organizational strategy through cross-sector coordination and disaster awareness campaigns. Program strategy is reflected in mitigation efforts, emergency response, and infrastructure recovery, while resource support strategy involves the utilization of human resources, equipment, and available budget. Institutional strategy is evident in the use of regulations, SOPs, and the delegation of authority in disaster management. However, the implementation of these strategies still faces challenges, including limited budgets, low community participation, and communication barriers in affected areas. Overall, the BPBD strategy in Sijunjung Regency has been relatively effective, but it requires strengthening in funding, collaboration, and community empowerment to ensure that landslide disaster management is more efficient, sustainable, and comprehensive.

Keywords: BPBD Strategy, Landslide Management, Sijunjung Regency.

PENDAHULUAN

Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, termasuk wilayah yang rawan bencana tanah longsor. Data lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan peningkatan frekuensi longsor, dari 25 kali menjadi 34 kali, dengan Kecamatan Tanjung Gadang dan Sumpur Kudus mencatat angka tertinggi. Meskipun kecamatan lain seperti Kamang Baru, Kupitan, dan Koto Tujuh memiliki risiko lebih rendah, dampak longsor tetap signifikan terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, dan akses layanan dasar. Kondisi ini menjadi masalah empiris yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Secara teoretis, manajemen bencana membutuhkan strategi yang efektif dan berkelanjutan, meliputi mitigasi, tanggap darurat, serta pemulihan pasca-bencana.

Tabel 1. Jumlah Data Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kamang Baru	1	2	1	1	3
2.	Tanjung Gadang	7	5	5	6	9
3.	Sijunjung	3	4	4	4	6
4.	Lubuk Tarok	4	-	4	1	6
5.	IV Nagari	1	-	2	1	-
	Kupitan	1	-	1	-	1
	Koto Tujuh	2	-	2	-	1
	Sumpur Kudus	6	6	9	10	8
	Jumlah	25	17	24	23	34

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan data frekuensi longsor di Kabupaten Sijunjung pada periode 2020–2024, terlihat tren peningkatan kejadian bencana, dengan total 34 kali longsor pada tahun 2024, menjadikan Kabupaten Sijunjung sebagai kabupaten ketiga dengan jumlah longsor tertinggi di Sumatera Barat. Kecamatan dengan frekuensi longsor tertinggi adalah Tanjung Gadang (9 kali) dan Sumpur Kudus (8 kali) pada tahun 2024, diikuti Kecamatan Sijunjung dan Lubuk Tarok masing-masing 6 kali. Kecamatan lain seperti Kamang Baru, Kupitan, dan Koto Tujuh memiliki jumlah kejadian lebih rendah, namun tetap menunjukkan risiko yang signifikan. Tren ini menunjukkan adanya kerentanan wilayah yang berbeda-beda antar kecamatan, di mana beberapa kecamatan menjadi titik rawan longsor berulang. Selain itu, data menunjukkan fluktuasi tahunan, misalnya di Kecamatan Sumpur Kudus yang mengalami peningkatan tajam dari 6 kali (2021) menjadi 10 kali (2023), kemudian sedikit menurun menjadi 8 kali pada 2024. Kondisi ini menandakan bahwa intervensi mitigasi bencana perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal tiap kecamatan, termasuk penguatan strategi BPBD dalam pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan.

Kesenjangan yang ditemukan dalam literatur menunjukkan bahwa sebagian besar studi terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek sosialisasi, edukasi masyarakat, dan koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana. Meskipun aspek-aspek ini penting, penelitian-penelitian sebelumnya belum meneliti secara menyeluruh bagaimana implementasi strategi BPBD dijalankan dalam seluruh tahapan bencana, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca-bencana. Selain itu, studi sebelumnya juga cenderung kurang menyoroti kendala operasional yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, peralatan, dan sumber daya manusia, serta dampaknya terhadap efektivitas penanganan bencana. Hal ini menjadi penting terutama bagi Kabupaten Sijunjung, yang memiliki frekuensi kejadian longsor tinggi, sehingga tantangan dalam pengelolaan risiko bencana menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih komprehensif, yang tidak hanya melihat peran BPBD dalam sosialisasi dan koordinasi, tetapi juga mengkaji implementasi strategi secara menyeluruh, kendala yang muncul, serta bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di wilayah ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: “Bagaimana strategi BPBD Kabupaten Sijunjung dalam penanggulangan bencana tanah longsor dilaksanakan di lapangan, dan kendala apa saja yang dihadapi?” Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kebaruan berupa analisis komprehensif terhadap implementasi strategi BPBD dari sisi organisasi, program, sumber daya, dan kelembagaan, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Sijunjung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Fiantika et al., 2022; Nasution, 2023). Penelitian dilakukan di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan pertimbangan tingginya frekuensi bencana tanah longsor pada tahun 2024, yakni sebanyak 34 kejadian, yang menempatkan kabupaten ini sebagai salah satu daerah dengan risiko longsor tertinggi di Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Camat dari wilayah terdampak, tokoh masyarakat, serta pakar kebencanaan. Selain wawancara, data juga dikumpulkan melalui dokumentasi resmi pemerintah, seperti laporan penanganan bencana, catatan rehabilitasi infrastruktur, data kerusakan jalan, dam, dan drainase, serta dokumen koordinasi lintas instansi.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode triangulasi sumber untuk menguji validitas informasi dari berbagai informan dan dokumen pendukung (Nasution, 2023; Fiantika et al., 2022). Hasil analisis disajikan secara naratif dengan fokus pada implementasi strategi BPBD dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan dini. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, guna menghasilkan informasi yang dapat dijadikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Sijunjung pada masa mendatang (Moleong, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sijunjung

Strategi BPBD Kabupaten Sijunjung dalam penanggulangan bencana tanah longsor disusun berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah yang menekankan pada peningkatan kesiapsiagaan serta perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana. Strategi tersebut diwujudkan dalam tiga tahap utama: pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana (pemulihan dini). Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, strategi BPBD tidak hanya bersifat reaktif terhadap kejadian bencana, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat.

Pada tahap pra-bencana, BPBD berfokus pada upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan pelatihan masyarakat di daerah rawan longsor. Menurut keterangan Sekretaris JPKP, Bapak Aris Supratman Malin Sati, S.Pd.I, kegiatan sosialisasi telah dilakukan secara rutin di kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Tanjung Gadang dan Sumpur Kudus. Namun, partisipasi masyarakat masih relatif rendah karena sebagian besar warga menganggap bencana sebagai fenomena alam yang tidak dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kesadaran masyarakat sudah berjalan, tetapi efektivitasnya masih terbatas oleh faktor perilaku dan budaya lokal.

Selanjutnya, pada tahap tanggap darurat, BPBD Sijunjung berperan sebagai koordinator utama dalam menggerakkan seluruh potensi daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Sumpur Kudus, Bapak Feri Yurnalis, S.STP, setiap kali terjadi longsor, BPBD segera melakukan koordinasi lintas sektor dengan Dinas PUPR, TNI/Polri, dan pemerintah nagari. Tim gabungan diturunkan untuk melakukan pendataan cepat, evakuasi korban, serta pembersihan material longsor di jalan-jalan utama. Strategi ini menunjukkan efektivitas koordinasi antarinstansi, meskipun sering terkendala oleh faktor medan dan akses wilayah yang sulit dijangkau.

Sementara itu, dalam tahap pemulihan dini, BPBD bekerja sama dengan Dinas PUPR dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat longsor. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PUPR, dari total 40 ruas jalan yang terdampak longsor, sebanyak 10 ruas telah diperbaiki dalam kurun waktu tiga bulan pascakejadian. Perbaikan ini difokuskan pada jalur strategis antar-nagari dan akses menuju fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas. Strategi pemulihan ini memperlihatkan adanya skala prioritas yang jelas, meskipun belum mencakup seluruh wilayah terdampak.

Selain ketiga tahap tersebut, BPBD juga berupaya memperkuat sistem koordinasi melalui pembentukan forum penanggulangan bencana tingkat kecamatan. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Upaya ini merupakan bentuk strategi jangka panjang untuk memperkuat kelembagaan kebencanaan di tingkat akar rumput. Berdasarkan analisis penulis, strategi BPBD Sijunjung secara umum telah berjalan dengan arah yang jelas dan sesuai dengan prinsip manajemen bencana terpadu. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan nonteknis yang berdampak terhadap efektivitas di lapangan.

Analisis Keterkaitan Antar Indikator Strategi

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat adanya keterkaitan yang kuat antara keempat dimensi strategi BPBD Kabupaten Sijunjung dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Strategi organisasi (corporate strategy) yang menekankan visi dan misi pemerintah daerah menjadi dasar bagi penyusunan program, koordinasi lintas sektor, serta penentuan prioritas mitigasi dan pemulihan. Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam strategi program (program strategy), yang mencakup rencana operasional pra-bencana, tanggap darurat, dan pemulihan dini, termasuk pembagian tugas antar instansi dan alokasi prioritas pada ruas jalan terdampak.

Keterkaitan ini semakin diperkuat oleh strategi pendukung sumber daya (resource support strategy), di mana ketersediaan SDM, alat berat, BBM, serta anggaran menjadi faktor penentu efektivitas pelaksanaan strategi program. Misalnya, perbaikan sementara 10 dari 40 ruas jalan yang terdampak longsor hanya bisa dilakukan karena dukungan sumber daya terbatas. Tanpa pemanfaatan sumber daya yang optimal, strategi organisasi dan program akan sulit diimplementasikan secara efektif. Selain itu, strategi kelembagaan (institutional strategy) BPBD menjadi pengikat yang memastikan peran dan tanggung jawab masing-masing instansi berjalan sesuai SOP. Koordinasi dengan Dinas PUPR, camat, wali nagari, dan aparat keamanan menunjukkan bahwa struktur kelembagaan mendukung eksekusi program di lapangan, meski masih menghadapi kendala komunikasi dan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, menurut analisis penulis, keempat indikator strategi ini saling terkait dan saling memperkuat. Strategi organisasi menjadi landasan visi dan misi, strategi program mengeksekusi rencana, strategi sumber daya menyediakan kapasitas untuk pelaksanaan, dan strategi kelembagaan memastikan implementasi berjalan tertib. Keseimbangan dan sinergi antar indikator ini menjadi kunci efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Sijunjung.

Kendala dalam Implementasi Strategi Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sijunjung

Meskipun BPBD Kabupaten Sijunjung telah memiliki strategi yang cukup komprehensif, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala struktural, teknis, dan sosial. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Menurut pernyataan Irsyadul Halim selaku pakar kebencanaan, selama dua tahun terakhir terjadi efisiensi anggaran daerah yang berdampak langsung terhadap pengurangan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan. Akibatnya, beberapa program preventif tidak dapat dijalankan secara maksimal, sehingga fokus BPBD lebih tertuju pada

penanganan tanggap darurat ketimbang pencegahan. Selain itu, kendala dari sisi sarana dan prasarana juga cukup dominan. Kabupaten Sijunjung memiliki kondisi geografis berbukit dan jalan yang sempit, sehingga akses menuju lokasi longsor sering kali terhambat. Jumlah alat berat yang terbatas serta ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendala tambahan dalam mempercepat proses evakuasi dan pemulihan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan pihak PUPR yang menyebutkan bahwa beberapa ruas jalan yang rusak tidak dapat segera ditangani karena menunggu mobilisasi alat dari kabupaten lain. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan logistik dan dukungan teknis masih menjadi titik lemah dalam implementasi strategi.

Kendala lain yang cukup krusial adalah lemahnya sistem komunikasi di wilayah terdampak. Berdasarkan temuan lapangan, hilangnya sinyal komunikasi saat terjadi bencana menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan respon cepat. Di beberapa nagari, aparat setempat harus menempuh jarak jauh untuk menyampaikan informasi ke posko utama BPBD. Situasi ini menghambat koordinasi lintas sektor yang seharusnya berjalan simultan. Dari sisi sosial, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi kendala signifikan. Meskipun BPBD telah melakukan edukasi dan simulasi bencana, sebagian masyarakat masih pasif dan tidak menerapkan langkah-langkah mitigasi sederhana seperti pembuatan drainase atau penanaman vegetasi di lereng rawan longsor. Minimnya kesadaran kolektif ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi risiko belum berhasil mengubah perilaku masyarakat secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut memperlihatkan bahwa implementasi strategi BPBD Sijunjung masih menghadapi ketidakseimbangan antara perencanaan dan kemampuan sumber daya yang tersedia. Koordinasi lintas sektor memang berjalan, tetapi belum ditopang dengan kesiapan logistik, sarana komunikasi, dan dukungan partisipatif yang kuat. Oleh karena itu, ke depan BPBD perlu memperkuat aspek perencanaan berbasis risiko, memperluas pelibatan masyarakat, serta memperjuangkan peningkatan anggaran agar strategi penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat di daerah rawan longsor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi BPBD Kabupaten Sijunjung dalam penanggulangan bencana tanah longsor telah berjalan melalui keempat dimensi strategi, yaitu organisasi, program, pendukung sumber daya, dan kelembagaan. Strategi ini tercermin dalam kegiatan pra-bencana (sosialisasi dan edukasi), tanggap darurat (koordinasi lintas instansi dan perbaikan sementara jalan), serta pemulihan dini (rekonstruksi dan pemantauan infrastruktur), yang saling terkait dan memperkuat efektivitas penanganan bencana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran dan SDM, rendahnya partisipasi masyarakat, alat berat terbatas, serta hambatan komunikasi di lapangan. Menurut analisis penulis, meskipun strategi BPBD sudah terstruktur dan berada di jalur yang tepat, penguatan sumber daya, perbaikan koordinasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat tetap diperlukan agar penanggulangan bencana tanah longsor dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

Ardes, W., Mizwar, Z., & Putra, R. R. (2024). Faktor Penyebab Tanah Longsor Pada Wilayah Kabupaten Sijunjung. *Sigma Teknika*, 7(2), 428-438.



- Aulia, C., & Meiwanda, G. (2022). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok Sumatera Barat. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(3), 35-44.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sijunjung. (2024). *Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Sijunjung*. Sijunjung: BPBD Kabupaten Sijunjung.
- Dinda, D. H., & Ginting, W. O. (2023). Strategi Pendukung Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Tebing Tinggi Kota. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 323-339.
- Dewi Fitriani, I., Zulkarnaen, W., Bagianto, A., Muhammadiyah Bandung, S., & Muhammadiyah Bandung, U. (2021). Analisis Manajemen Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Tangkuban Parahu Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 91-111.
- Falaq, Y., Jannah, M. R., & Rohmatunnisa, R. (2021). Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Banjir di Desa Niaso Muaro Jambi. *Proceeding the 1st NCESCO: National Conference on Educational Science and Counseling*, 1(1), 71-80.
- Gustaman, F. A. I., Rahmat, H. K., Banjarnahor, J., & Maarif, S. (2020). Peran Kantor Pencarian Dan Pertolongan Lampung Dalam Masa Tanggap Darurat Tsunami Selat Sunda Tahun 2018. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 462-469.
- Haribulan, R., Gosal, P. H., & Karongkong, H. H. (2019). Kajian kerentanan fisik bencana longsor di Kecamatan Tomohon Utara. *Spasial*, 6(3), 714-724.
- Heryati, S. (2020). Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 139-146.
- Hamid, N., Setyowati, D. L., Juhadi, J., Priyanto, A. S., Wijayanti, N. R., & Aroyandini, E. N. (2021). Peran Pendidikan Formal, Keluarga, dan Masyarakat dalam Pendidikan Bencana. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang*, 403-409.
- Hartono, D., Maarif, S., Sari, D. A. P., & Wilopo, W. (2022). Pemulihan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Terdampak Tsunami di Kabupaten Pandeglang untuk Mendukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 8(1).
- Haryanti, R. N. (2024). *STRATEGI BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Kiyato, P. L., Purwanto, D., & Budiati, A. C. (2024). Tepisari Village Government Strategies in Increasing Community Participation in Development Programs. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 384-392.

- Mahardika, D., & Setianingsih, E. L. (2018). Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Banjir di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 502–518.
- Melani Eka Putri, & Ikhwan. (2024). Analisis Dampak Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi Sumatera Barat 2024. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7(5).
- Mahendra, A. I., & Sutiyo, S. (2024). *STRATEGI PENCEGAHAN KEBAKARAN PERMUKIMAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Puspita, S., & Wulandari, S. (2024). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)*, 8(1), 16-26.
- Pratikno, H., Rahmat, H. K., & Sumantri, S. H. (2020). Implementasi Cultural Resource Management dalam Mitigasi Bencana pada Cagar Budaya di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 427–436.
- Qodriyatun, S. N. (2020). Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 29–42.
- Ramadhani, S. S., & Hilman, Y. (2022). Strategi BPBD Kabupaten Pacitan Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor. *Jurnal Riset Inossa: Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam*, 4(1), 24-37.
- Rediana, R. K. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol)*, 1(1), 35-45.
- Rizana, W., & Alhadi, Z. (2021). Efektivitas Peran BPBD Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(3).
- Ruchban, A. L., Darwis, R. S., & Wibowo, H. (2024). Elemen Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 79-88.
- Sihaloho, J. T. B., Panjaitan, M., Pasaribu, J., & Tobing, A. L. (2025). STRATEGI PEMERINTAH DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG BERINGIN I, KECAMATAN SUMBUL, KABUPATEN DAIRI). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(3), 134-145.
- Saputra, N. G., Rifai, M., & Marsingga, P. (2021). Strategi penanggulangan bencana banjir Kabupaten Karawang di Desa Karangligar sebagai desa tangguh bencana. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 62-76.

- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64-83.
- Sholikhah, S. N. H., Prambudi, S. K. N., Efvfendi, M. Y., Safira, L., Alwinda, N., & Setiaji, R. (2021). Analisis kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo. *JPIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi)*, 6(1), 81-90.
- Silalahi, R. H., Silaban, J., & Naibaho, R. M. (2025). Edukasi Mitigasi Bencana dan Evakuasi Korban Bencana Tanah Longsor pada Siswa SMA Negeri 1 Kerajaan Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 8(1), 38-46.
- Suryadi, N. (2020). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2, 425-436.
- Syugiarto, S., Ibnu Khaldun, R., Tawil, Y. P., & Kusnadi, H. W. (2022). Pemulihan Pasca-Bencana di Indonesia: Perlukah Dilakukan Perubahan Kebijakan? *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1).
- Trisnawanti, S. T. (2022). Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. *Doctoral dissertation*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Tumei, I. (2023). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Doctoral dissertation*, IPDN.
- Widagdo, P. B., & Khasanah, R. (2023). EWS (Early Warning System) sederhana sebagai pendeteksi dini tanah longsor di kawasan Desa Kenalan. *Jurnal Bina Desa*, 5(1), 1-8.